



Pojok  
IKLIM

**IMPLEMENTASI**  
INDONESIA'S  
**FOLU**  
NET SINK  
**2030**

**BIDANG**  
**PENGELOLAAN**  
**HUTAN LESTARI**

Disampaikan Oleh:  
**Ir. Istanto, MSc**

**Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan**  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

# OUTLINE



1. PENGANTAR UMUM TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI



2. TARGET AKSI MITIGASI INDONESIA'S FOLU NET SINK 2030 BIDANG PHL

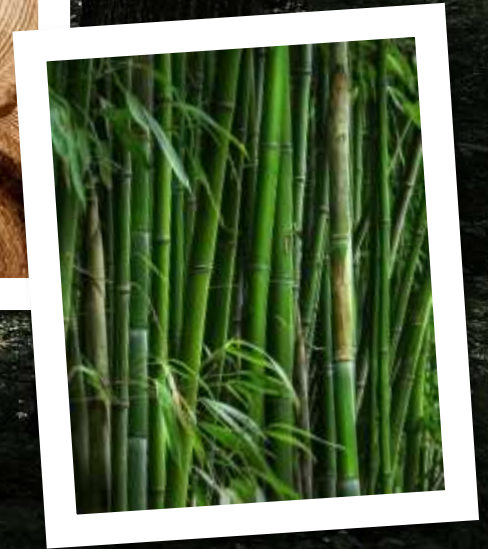
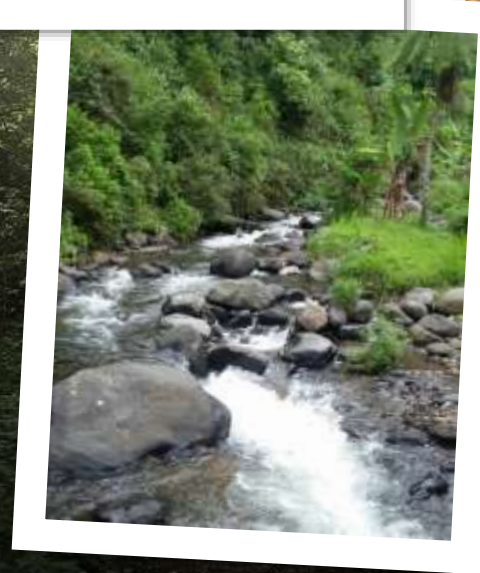


3. KEGIATAN UTAMA BIDANG PHL DALAM RANGKA FOLU NET SINK 2030



1

**1. PENGANTAR  
UMUM TUGAS  
DAN FUNGSI  
DIREKTORAT  
JENDERAL PHL**



# REKONFIGURASI PENGELOLAAN HUTAN

Pasca Berlaku UU  
No. 11 Tahun 2020

**HUTAN SEBAGAI SATU KESATUAN  
EKOSISTEM**

**(Landscape Management)**

*Ecologically Sustainable, Socially Acceptable,  
Economically Feasible*

Pengelolaan *Landscape*/SFM

**KELOLA SOSIAL**

**KELOLA LINGKUNGAN**

**KELOLA EKONOMI**

Persetujuan Lingkungan

**PENGUATAN AKSES  
LEGAL MASYARAKAT**

**MULTIUSAHA:  
KEHUTANAN**

**PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL DAN  
PERIZINAN BERUSAHA**

# PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI

Perizinan Berusaha Melalui Multiusaha Kehutanan  
di **HUTAN LINDUNG**

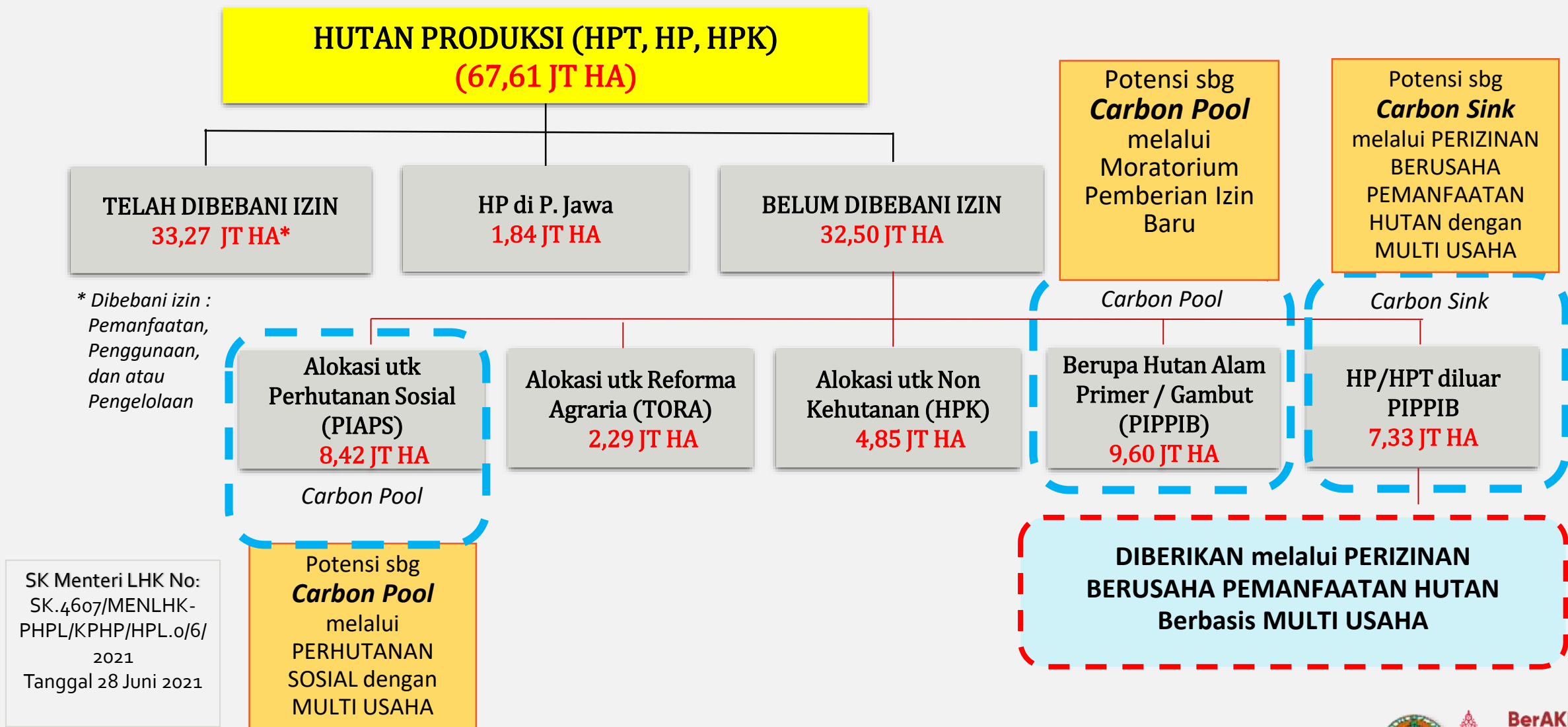


Perizinan Berusaha Melalui Multiusaha Kehutanan  
di **HUTAN PRODUKSI**

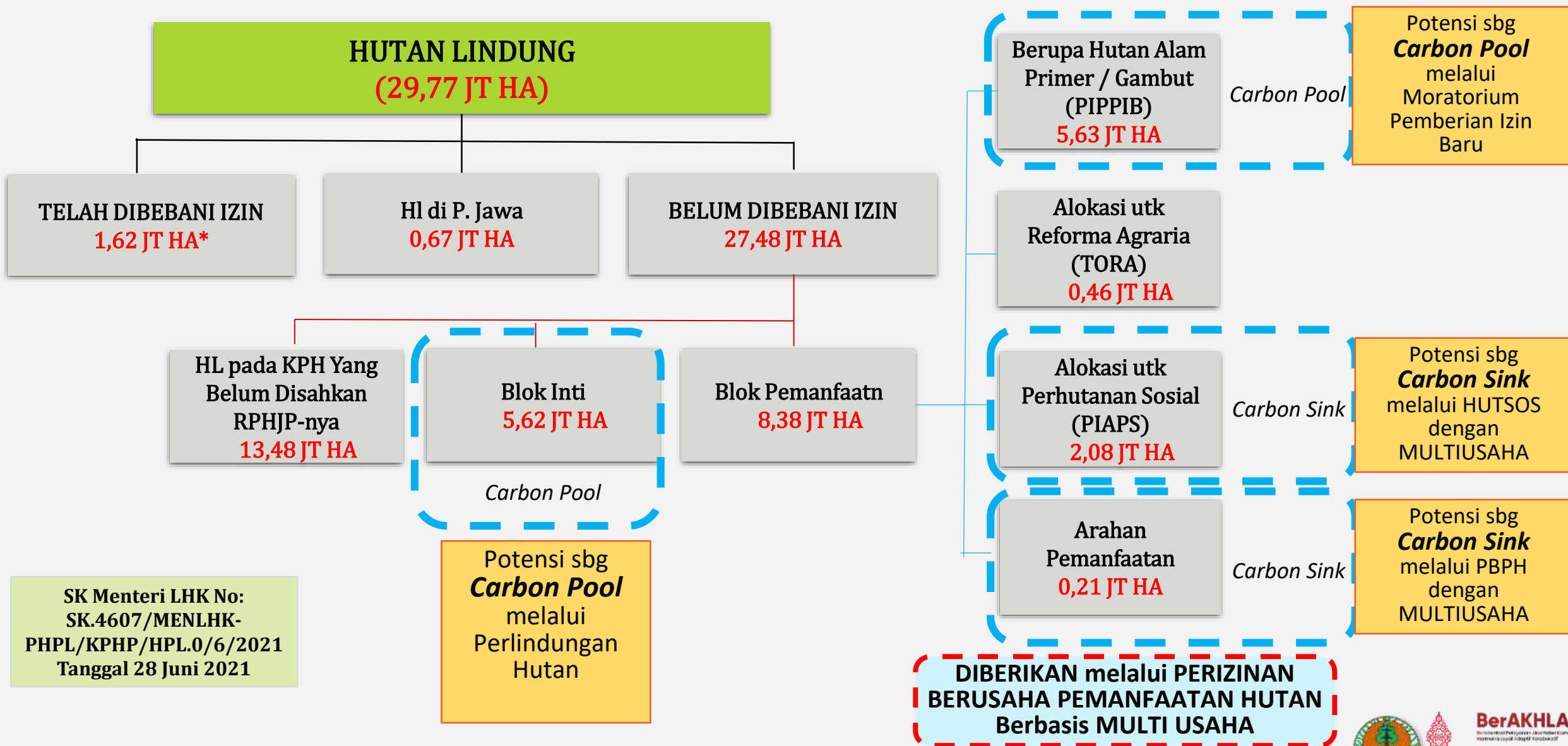


1. Pemanfaatan HP & HL melalui pemberian perizinan berusaha pemanfaatan hutan;
2. Pada HP dapat dilakukan usaha pemanfaatan kawasan, jasa ling, hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu s.d. Pengolahan hasil hutan.
3. Pada HL dapat dilakukan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan usaha hasil hutan bukan kayu.
4. *Social Forestry* (Multi usaha: pemanfaatan kayu, HHBK, dan Jasling; akses legal masyarakat)
5. Pemanfaatan nilai lahan hutan lebih optimal

# ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI (JUNI 2021)



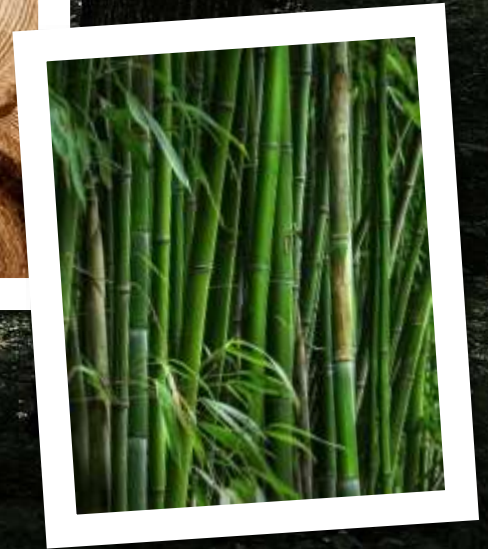
# ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG (JUNI 2021)



SK Menteri LHK No:  
SK.4607/MENLHK-  
PHPL/KPHP/HPL.0/6/2021  
Tanggal 28 Juni 2021

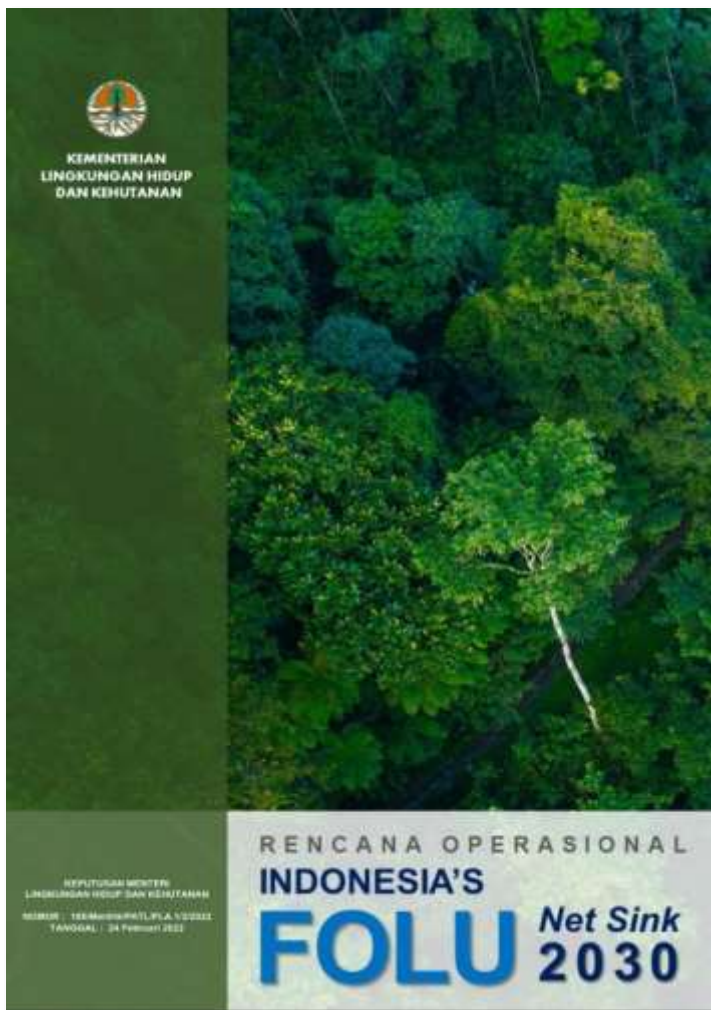
2

**TARGET AKSI  
MITIGASI  
INDONESIA'S  
FOLU NET SINK  
2030 BIDANG  
PHL**





SK Menteri LHK No.168/MENLHK/PKTL/ PLA.1/2022



## AKSI MITIGASI FOLU NET SINK 2030 YANG TERKAIT DENGAN BIDANG PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

- A. Pencegahan/Penurunan Laju Deforestasi Hutan
- B. Pengendalian Degradasi Hutan Konsesi
- C. Pembangunan Hutan Tanaman
- D. Pengelolaan Hutan Lestari
- E. Rehabilitasi Dengan Rotasi dan non Rotasi
- F. Pengelolaan Lahan Gambut

Dokumen dapat diunduh melalui tautan:

[https://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/4694/rencana-operasional-indonesia-s-folunet-sink-2030](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4694/rencana-operasional-indonesia-s-folunet-sink-2030)

# RUANG LINGKUP INDONESIA'S FOLU NET SINK 2030

- 1** Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral
  - 2** Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Gambut dan Mangrove
  - 3** Pengurangan Laju Degradasi Hutan Lahan Mineral
  - 4** Pengurangan Laju Degradasi Hutan Lahan Gambut dan Mangrove
- 
- 5** Pembangunan Hutan Tanaman
  - 6** Pengelolaan Hutan Lestari
  - 7** Rehabilitasi Dengan Rotasi
  - 8** Rehabilitasi Non Rotasi
- 
- 9** Restorasi Gambut dan Perbaikan Tata Air Gambut
  - 10** Rehabilitasi mangrove dan aforestasi pada kawasan bekas tambang
  - 11** Konservasi Keanekaragaman Hayati
  - 12** Perhutanan Sosial
- 
- 13** Pengembangan dan pematapan Hutan Adat
  - 14** Introduksi Replikasi Ekosistem, Ruang Terbuka Hijau dan Ekoriparian
  - 15** Pengawasan dan *law enforcement* dalam mendukung perlindungan dan pengamanan kawasan hutan

## A. PENCEGAHAN/PENURUNAN LAJU DEFORESTASI HUTAN



- Ditjen PHL memiliki kontribusi pelaksanaan perlindungan hutan sebesar 4,07 juta ha hingga tahun 2030, dimana sebanyak 1,59 juta ha perlindungan hutan dari deforestasi terencana dan 2,48 juta ha perlindungan hutan dari deforestasi tidak terencana.
- Perlindungan hutan dari **deforestasi terencana** di area pengawasan Ditjen PHL sebagian besar berada di dalam area berizin khususnya PBPH HT, yakni sebesar 1,37 juta ha, sedangkan sebesar 0,22 juta ha berada dalam area HPK.
- Hutan alam dalam area PBPH HT yang memiliki potensi tertinggi mengalami deforestasi terencana berada di **Provinsi Papua, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Maluku**.
- Di dalam kawasan HPK, mayoritas hutan alam yang berpotensi mengalami deforestasi terencana berada di Provinsi Kalimantan Tengah.

## B. PENGENDALIAN DEGRADASI HUTAN KONSESI



- Terdapat hutan primer seluas 4,89 juta ha yang berada di dalam area PBPH HA.
- Seluas 4,38 juta ha area tersebut berpotensi mengalami degradasi terencana, yang sebagian besar berada di Provinsi Papua dan Papua Barat.
- Seluas 17.000 ha dari hutan primer di PBPH HA juga berpotensi mengalami degradasi tidak terencana yang sebagian besar berada di Kalimantan Tengah.
- Di dalam area PBPH HT, terdapat hutan primer seluas 0,30 juta ha.

# C. PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN

## LUAS AREA PELAKSANAAN PROGRAM AKSI MITIGASI PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN MENURUT PEMANGKU KAWASAN

Provinsi	NDC-CM1 dan Net sink LTS		
	PHL (PBPH HT)	PSKL (KPHP-PIAPS)	TOTAL (ha)
Aceh	46.130	28	46.158
Bangka-belitung	63.144	27.740	90.885
Bengkulu		8.754	8.754
Daerah Istimewa Yogyakarta		6	6
Gorontalo	10.832	6.580	17.411
Jambi	45.999	16.545	62.544
Kalimantan Barat	126.412	26.847	153.259
Kalimantan Selatan	62.072	14.495	76.567
Kalimantan Tengah	103.452	122.594	226.046
<b>Kalimantan Timur</b>	<b>446.411</b>	<b>44.625</b>	<b>491.037</b>
Kalimantan Utara	46.473	20.707	67.180
Kepulauan Riau		27.556	27.556
Lampung	1.633	2.893	4.526
Maluku	47.847	27.954	75.802
Maluku Utara	5.447	9.970	15.417
Nusa Tenggara Barat	4.319	2.902	7.221
Nusa Tenggara Timur	4.913	13.333	18.246
Papua	106.171	204.458	310.629
Papua Barat	775	7.861	8.636
Riau	22.648	15.687	38.335
Sulawesi Barat	3.303	492	3.795
Sulawesi Selatan	2.352	9.519	11.871
Sulawesi Tengah	14.788	13.053	27.841
Sulawesi Tenggara	10.031	28.406	38.437
Sulawesi Utara	704	3.221	3.925
Sumatera Barat	4.653	4.351	9.005
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>154.906</b>	<b>17.696</b>	<b>172.602</b>
Sumatera Utara	11.012	19.626	30.637
<b>Total (ha)</b>	<b>1.346.427</b>	<b>697.901</b>	<b>2.044.328</b>

Area lahan tidak produktif yang dapat dimanfaatkan untuk perluasan hutan tanaman dalam kawasan PBPH HT cukup tinggi yakni sekitar 1,35 juta Ha, sebagian besar berada di Provinsi Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan.

# D. PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

## TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN PHL UNTUK NDC-CM1 DAN LTS-LCCP

Aksi mitigasi	Luas tahun 2019 (x 1000 ha)	Target NDC-CM1 (x 1000 ha)			Target Net Sink (x 1000 ha) / LTS-LCCP		
		Kumulatif 2024	Kumulatif 2030	Sisa kuota	Kumulatif 2024	Kumulatif 2030	Sisa kuota
<b>PHL-SILIN</b>	167 <sup>1</sup>	1.589	3.105	2.669	1.413	2.207	1.770
<b>PHL-RIL C</b>	269 <sup>2</sup>						

Catatan: <sup>1</sup>Data diperoleh dari data kegiatan APHI; <sup>2</sup>Data diperoleh dari luasan PBPH HA dengan status sertifikasi baik dan dibagi dengan periode rotasi HA. <sup>3</sup>Sisa kuota merupakan nilai selisih antara luasan target dengan luasan yang sudah terealisasi.

- Peningkatan serapan hutan sekunder, baik melalui kegiatan pengayaan maupun RIL, merupakan salah satu aksi kunci untuk sektor kehutanan dan lahan dalam mencapai target net sink.
- Pada saat ketersediaan lahan mencapai kondisi saturated, dimana hampir semua lahan sudah dimanfaatkan, maka peningkatan serapan hanya dapat dilakukan melalui perluasan area pengelolaan hutan sekunder.
- Target pelaksanaan kegiatan mitigasi PHL menuju net sink (LTS-LCCP) pada tahun 2030 masing-masing sebesar 3,10 juta ha dan 2,2 juta ha.
- Berdasarkan laporan dari APHI dan data sertifikasi area PBPH HA, total kumulatif implementasi silvikultur intensif (SILIN) hingga tahun 2019 adalah 167 ribu ha, sedangkan estimasi total kumulatif penerapan RIL-C hingga tahun 2019 sebesar 269 ribu ha.
- Penerapan kegiatan PHL yang dibutuhkan hingga tahun 2030 sebesar 2,67 juta ha untuk target NDC dan 1,77 juta ha untuk target net sink.

## D. PENGELOLAAN HUTAN LESTARI



- Ditjen PHL memiliki kontribusi tertinggi terhadap pencapaian kegiatan mitigasi aksi pengelolaan hutan lestari, yakni sebesar 1,77 juta Ha.
- Sekitar 85% berada di empat provinsi yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat.
- Meskipun dalam implementasinya, kegiatan PHL diutamakan pada area perizinan PBPH di kawasan hutan produksi, namun, hasil analisis spasial template perencanaan operasional menunjukkan bahwa masih terdapat area di luar konsesi yang berisiko tinggi di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi.

Provinsi	PSKL			KSDAE	PDASRH	Total (ha)
	KPHL-PIAPS	KPHP-PIAPS	Total (Ha)	Hutan Konservasi	HL-Non PIAPS	
Aceh	-	-	-	-	1	1
Bangka-belitung	-	-	-	-	52	52
Jambi	-	11	11	0	-	0
Jawa Timur	-	-	-	8	-	8
Kalimantan Barat	3	209	212	3	-	3
Kalimantan Selatan	-	-	-	90	-	90
Kalimantan Tengah	98	1.871	1.968	8	21	29
Kalimantan Timur	-	0	0	433	0	433
Lampung	-	-	-	1	-	1
Nusa Tenggara Barat	-	39	39	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	894	-	894	5	3.880	3.885
Papua	7	-	7	-	187	187
Riau	1	483	484	0	25	25
Sumatera Barat	-	14	14	-	0	0
Sumatera Selatan	-	0	0	0	117	117
Sumatera Utara	57	0	57	-	313	313
<b>Total (ha)</b>	<b>1.060</b>	<b>2.627</b>	<b>3.686</b>	<b>548</b>	<b>4.597</b>	<b>5.145</b>

- Di dalam wilayah PIAPS (Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial) terdapat potensi kegiatan pengayaan seluas 3.686 ha, 28% pada kawasan hutan lindung dan 72% pada kawasan hutan produksi.
- Di dalam kawasan Hutan Lindung, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi tertinggi kegiatan pengayaan, sedangkan di dalam kawasan hutan produksi pada Provinsi Kalimantan Tengah.



# E. REHABILITASI DENGAN ROTASI DAN NON ROTASI

## NON-ROTASI

### LUAS AREA PELAKSANAAN PROGRAM AKSI REHABILITASI NON ROTASI DALAM KAWASAN DITJEN PHL

Provinsi	HP-Non Konsesi	PBPH-HA	PBPH-HT	PBPH-RE	HP-Non KPH (HPK)	TOTAL (ha)
Bangka-belitung	127	-	-	-	-	127
Jambi	2.585	-	57.175	10.615	-	70.375
Kalimantan Barat	39.918	13	50.775	12	1.494	92.213
Kalimantan Selatan	8.363	569	15.012	-	3.982	27.926
Kalimantan Tengah	53.064	2.298	20.408	151	65.236	141.157
Kalimantan Timur	21.865	1.051	26.304	-	2.884	52.104
Lampung	6.772	-	-	-	-	6.772
Nusa Tenggara Timur	183	-	-	-	-	183
Papua Barat	147	-	-	-	-	147
Riau	49.855	2.627	89.642	2.573	52.177	196.874
Sumatera Barat	272	-	0	-	1.976	2.248
Sumatera Selatan	47.139	-	114.440	7.270	646	169.495
Sumatera Utara	1.137	-	9.576	-	240	10.954
<b>Total (ha)</b>	<b>231.427</b>	<b>6.558</b>	<b>383.333</b>	<b>20.621</b>	<b>128.636</b>	<b>770.576</b>

- Potensi luas pelaksanaan kegiatan rehabilitasi non-rotasi di dalam kawasan hutan produksi yang berada di bawah kewenangan Ditjen PHL untuk mencapai target *FOLU Net Sink 2030*, sampai 2030 adalah sebesar 0,77 juta ha.
- Area ini sebagian besar tersebar di area PBPH HT dan area di luar konsesi di 3 provinsi yaitu Kalimantan Tengah, Riau dan Sumatera Selatan.

# E. REHABILITASI DENGAN ROTASI DAN NON ROTASI

## ROTASI

### LUAS AREA PELAKSANAAN PROGRAM AKSI REHABILITASI DENGAN ROTASI DALAM WILAYAH DITJEN PHL

Provinsi	HP-Non Konsesi	PBPH-HA	PBPH-HT	PBPH-RE	HP-Non KPH (HPK)	TOTAL (ha)
Bangka-belitung	1.331	-	-	-	-	1.331
Jambi	6.453	-	117.662	14.059	-	138.174
Kalimantan Barat	18.777	52	612.703	1.970	10.770	644.271
Kalimantan Selatan	12.892	67.397	67.926	-	4.403	152.617
Kalimantan Tengah	65.461	119.660	71.072	3.418	254.102	513.712
Kalimantan Timur	31.616	132.917	36.368	-	23.962	224.863
Lampung	3.311	-	-	-	-	3.311
Nusa Tenggara Timur	271	-	-	-	-	271
Papua Barat	98	-	-	-	-	98
Riau	1.473	1.181	92.336	-	7.073	102.063
Sumatera Barat	0	-	-	-	1.420	1.420
Sumatera Selatan	4.126	-	237.259	3.320	3.400	248.106
Sumatera Utara	389	-	8.304	-	12.114	20.807
<b>Total (ha)</b>	<b>146.198</b>	<b>321.205</b>	<b>1.243.630</b>	<b>22.768</b>	<b>317.243</b>	<b>2.051.043</b>

- Area untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dengan rotasi tertinggi di bawah Ditjen PHL tersebar di area PBPH HT seluas 1,24 juta ha dan lebih dari separuh area berada di Provinsi Kalimantan Barat, sementara di area PBPH HA mencapai 0,32 juta ha dan sebagian besar berada di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
- Di area PBPH RE, area pelaksanaan rehabilitasi dengan rotasi hanya sebesar 22 ribu ha, dimana lebih dari separuhnya berada di Provinsi Jambi.
- Area pelaksanaan rehabilitasi dengan rotasi di hutan produksi yang ada di luar konsesi mencapai 0,15 juta ha, dan di area HPK sebesar 0,32 juta ha.



## F. PENGELOLAAN LAHAN GAMBUT



- Skenario LTS-LCCP untuk target perbaikan tata air di lahan gambut menetapkan target yang lebih ambisius, yakni sebesar 0,95 juta ha pada tahun 2030, dibandingkan skenario NDC-CM1 yang hanya seluas 0,86 juta ha.
- Skenario net sink juga menetapkan target yang lebih tinggi untuk kegiatan restorasi lahan gambut, yakni sebesar 2,72 juta ha pada tahun 2030, dibandingkan skenario NDC-CM1 yang hanya seluas 1,40 juta ha .
- Berdasarkan laporan kegiatan BRGM, sejak menjalankan fungsinya pada tahun 2017 hingga 2019, BRGM beserta mitra telah melakukan kegiatan restorasi pada area seluas 835 ribu ha pada areal masyarakat (desa, APL). Sehingga, untuk mencapai target *net sink*, sisa kegiatan restorasi lahan gambut yang harus dipenuhi sampai tahun 2030 seluas 1,89 juta ha.

LUAS AREA PELAKSANAAN PROGRAM AKSI PENGELOLAAN LAHAN GAMBUT DALAM WILAYAH DITJEN PHL

Provinsi	HP-Non Konsesi	PBPH-HA	PBPH-HT	PBPH-RE	HP-Non KPH (HPK)	TOTAL
Jambi	-	14.221	1.200	-	-	15.421
Kalimantan Barat	-	397	34.067	-	-	34.464
Kalimantan Tengah	-	-	8.001	5.053	-	13.054
Kalimantan Timur	-	-	601	-	763	1.364
Riau	-	47.819	201.705	9.463	-	258.987
Sumatera Selatan	-	-	121.488	1.352	-	122.841
Sumatera Utara	12	-	-	-	675	687
<b>Total (ha)</b>	<b>12</b>	<b>62.437</b>	<b>367.062</b>	<b>15.869</b>	<b>1.438</b>	<b>446.819</b>

- Area perizinan PBPH berkontribusi melakukan kegiatan restorasi lahan gambut hingga tahun 2030 seluas 0,44 juta ha pada area PBPH HT yang sebagian besar berada di Provinsi Sumatera Selatan, seluas 62 ribu ha pada area PBPH HA dengan area terluas di Provinsi Riau, dan seluas 15 ribu ha pada area PBPH RE dengan area pelaksanaan tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah.
- Di luar area PBPH, terdapat area pelaksanaan restorasi lahan gambut seluas 1.438 ha di kawasan hutan HPK dan 12 ha di kawasan hutan produksi non konsesi.

3

**KEGIATAN UTAMA  
BIDANG PHL  
DALAM RANGKA  
FOLU NET SINK  
2030**





# SILIN MENUJU PELESTARIAN DAN PENINGKATAN MANFAAT HUTAN ALAM

## Teknik SILIN

Mengintegrasikan pemuliaan pohon, manipulasi lingkungan dan pengelolaan organisme pengganggu tanaman pada tegakan pohon dan lingkungannya untuk mempercepat pertumbuhan tanaman



100 BEST INNOVATIONS  
MINISTRY OF RESEARCH  
AND TECHNOLOGY  
IN 2008

## MANFAAT

1. Meningkatkan produktivitas hutan alam sekunder sebagai pasokan industri
2. Membantu menyelamatkan hutan alam yang tersisa beserta fungsinya
3. Memperbaiki lingkungan dengan kemampuannya untuk menyerap CO<sub>2</sub>

## DAMPAK

### Aspek Penyerapan Karbon

Mampu menyerap karbon hingga 250 ton C/Ha dalam kurun waktu 25 tahun, dua kali lipat dari kemampuan sistem TPTI yang hanya 115 ton C/Ha

### Aspek Vegetasi

1. Teknik SILIN tidak mengubah struktur vegetasi hutan alam (menggunakan ras unggul lokal)
2. Meningkatkan nilai variabilitas genetik sebesar 12% dibandingkan dengan regenerasi alami
3. Mengurangi laju erosi tanah hingga 76% dan aliran air permukaan tanah menjadi 62%
4. Menjaga tingkat kesuburan tanah



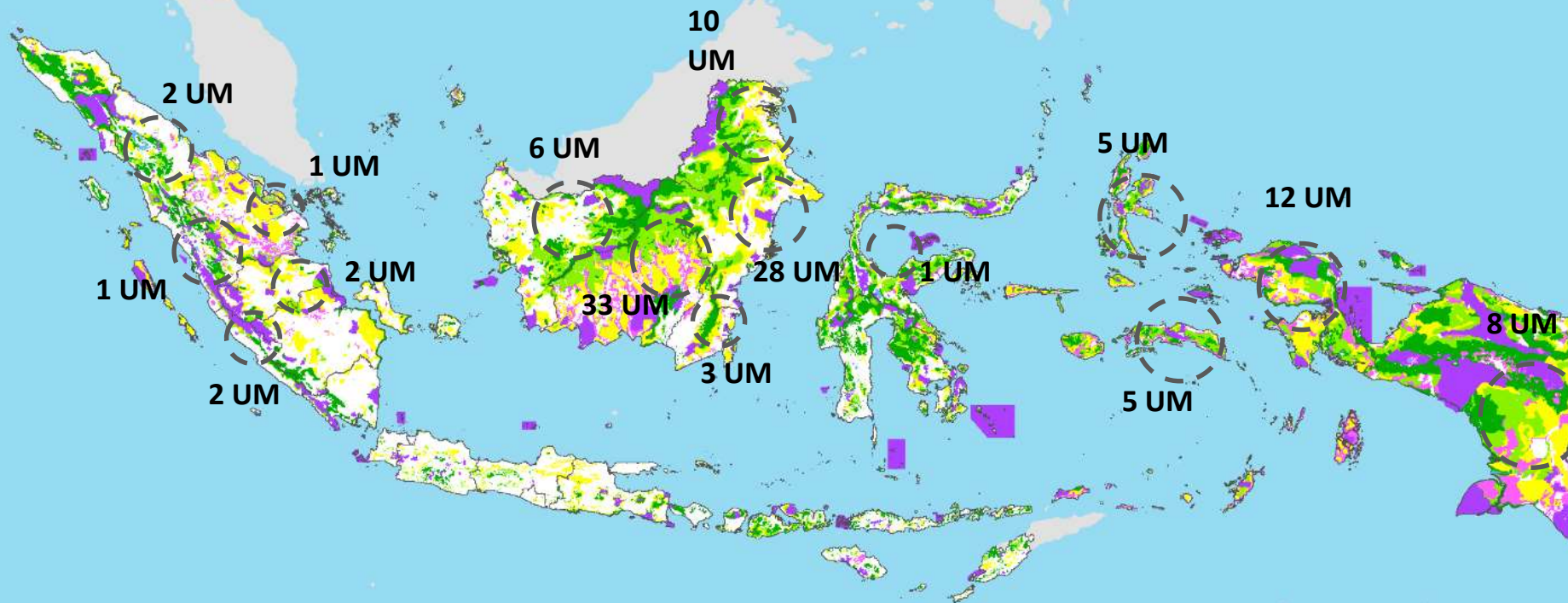
penyiapan lahan

tanaman 1 tahun

tanaman 20 tahun menuju hutan alam

# PBPH YANG MENERAPKAN TEKNIK SILIN

1. Teknik SILIN telah diterapkan di 119 unit PBPH (s.d Maret 2022).
2. Realisasi tanaman 1999 - Maret 2022 seluas 164.730 ha.
3. Sebaran Pelaksana SILIN:
  - a. Kaltim 28 UM
  - b. Kaltara 10 UM
  - c. Kalbar 6 UM
  - d. Kalteng 33 UM
  - e. Kalsel 3 UM
  - f. Sulteng 1 UM
  - g. Sumut 2 UM
  - h. Sumbar 1 UM
  - i. Bengkulu 2 UM
  - j. Maluku 5 UM
  - k. Malut 5 UM
  - l. Papua 8 UM
  - m. Papua Barat 12 UM.
  - n. Riau 1 UM
  - o. Jambi 2 UM



# DAMPAK IMPLEMENTASI RIL TERHADAP EMISI CO2 & STOK KARBON HUTAN ALAM

Mampu meningkatkan laju penyerapan CO2 dan penyimpanan karbon hutan



Penerapan RIL mampu meningkatkan daya serap CO2 sebesar 1,7 kali dan meningkatkan jumlah simpanan karbon hutan sebesar 1,56 kali

Penyimpanan karbon biomassa hutan pada penebangan konvensional hanya 45%, sedangkan pada penebangan dengan RIL adalah 77%. Selain itu, RIL mampu menurunkan emisi CO2 sebesar 41%

Mampu menjaga penyimpanan Karbon dan mengurangi emisi CO2



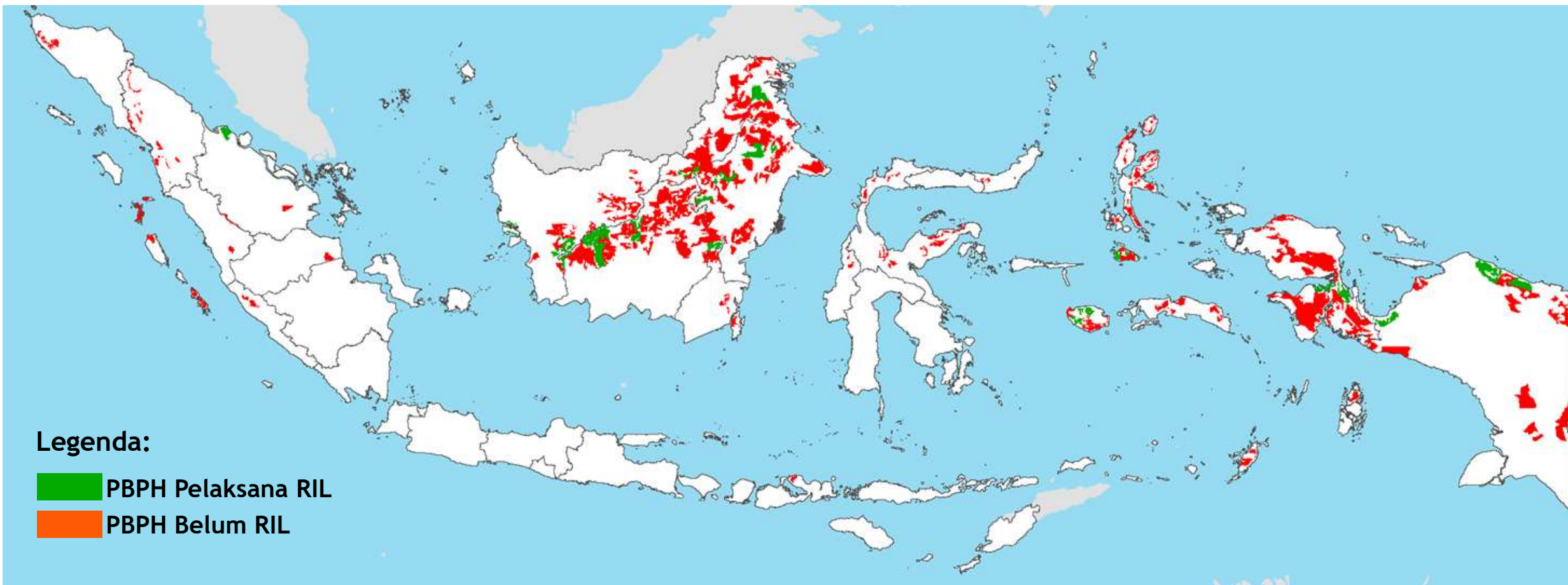
Sasaki dkk. (2016): Penerapan RIL di hutan alam tropis dapat menurunkan emisi CO2 sebesar 29-50% dari emisi CO2 yang disebabkan oleh deforestasi dan perubahan penggunaan lahan.

*Berdasarkan hasil penelitian Elias\* (2014) tentang Cadangan Karbon Hutan di Atas Permukaan Tanah pada Petak Penebangan Konvensional dan RIL di Kawasan IUPHHK PT. Inhutani II, Malinau*

*Guru Besar pada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB University*



# PBPH PELAKSANA RIL



**RIL 26 unit**  
**(61.582,40 Ha)**

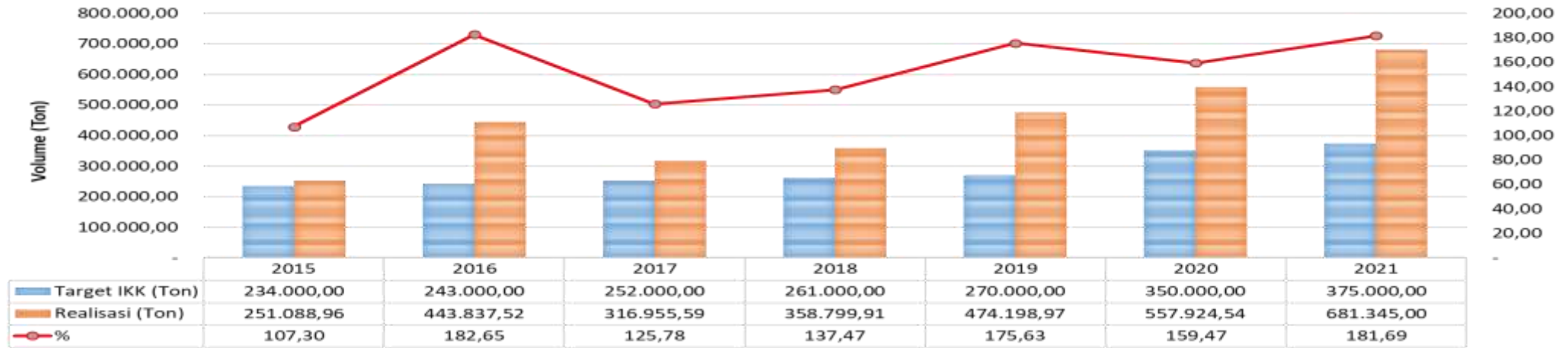
**Belum RIL**  
**225 unit**



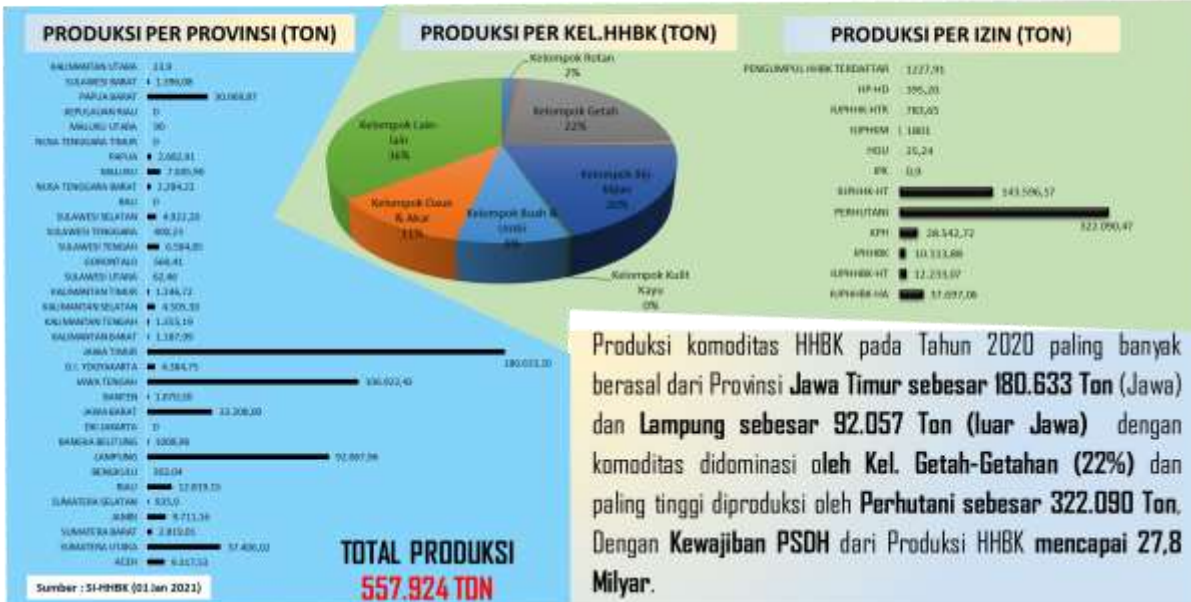
**251**  
**Unit PBPH**

# PRODUKSI HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK)

REALISASI PRODUKSI HHBK (TON) 2015-2021

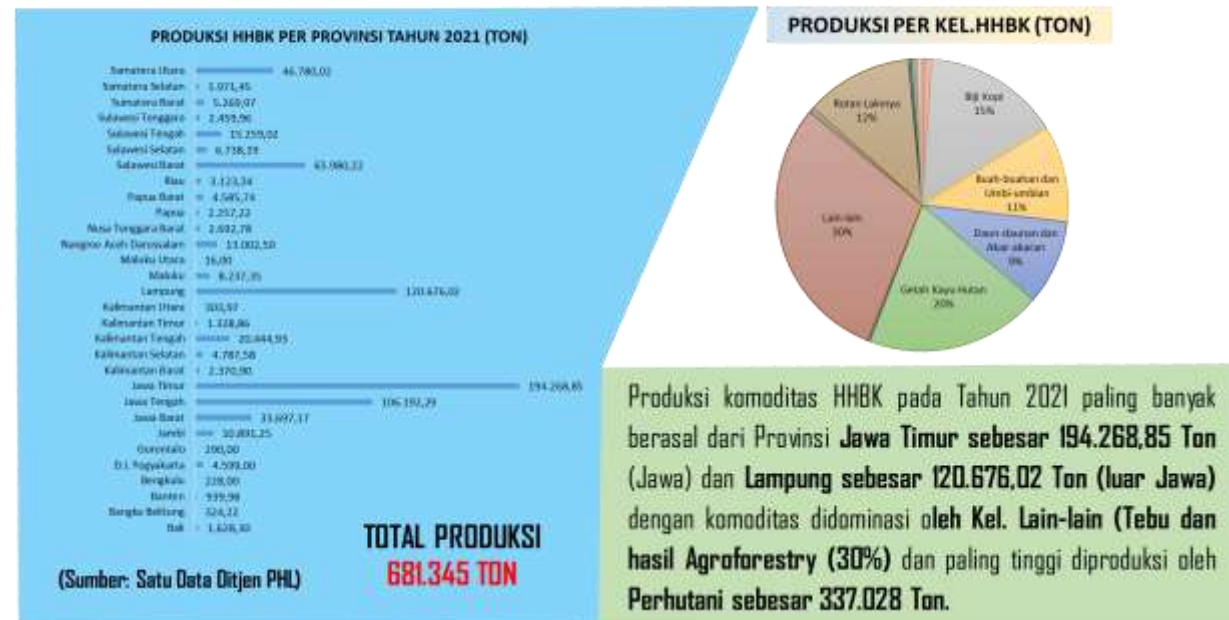


## GRAFIK CAPAIAN PRODUKSI HHBK PADA TAHUN 2020 :



Produksi komoditas HHBK pada Tahun 2020 paling banyak berasal dari Provinsi Jawa Timur sebesar 180.633 Ton (Jawa) dan Lampung sebesar 92.057 Ton (luar Jawa) dengan komoditas didominasi oleh Kel. Getah-Getahan (22%) dan paling tinggi diproduksi oleh Perhutani sebesar 322.090 Ton. Dengan Kewajiban PSDH dari Produksi HHBK mencapai 27,8 Milyar.

## GRAFIK CAPAIAN PRODUKSI HHBK PADA TAHUN 2021 :



Produksi komoditas HHBK pada Tahun 2021 paling banyak berasal dari Provinsi Jawa Timur sebesar 194.268,85 Ton (Jawa) dan Lampung sebesar 120.676,02 Ton (luar Jawa) dengan komoditas didominasi oleh Kel. Lain-lain (Tebu dan hasil Agroforestry) (30%) dan paling tinggi diproduksi oleh Perhutani sebesar 337.028 Ton.

# PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN ENERGI



Indonesia memiliki setidaknya 8 sumber energi terbarukan (biofuel, **biomassa**, panas bumi, air, angin, matahari, gelombang laut dan pasang surut).

## Sumber Biomassa

Bahan berligoselulosa  
: Kayu, bambu, rotan,  
termasuk limbah

Wood pellet, arang,  
kayu bakar, biooil

Buah / Biji :  
Nyamplung, Jarak,  
Kemiri Sunan, Kepuh,  
Malapari, Aren

Biodiesel,  
Biethanol



**Target:**

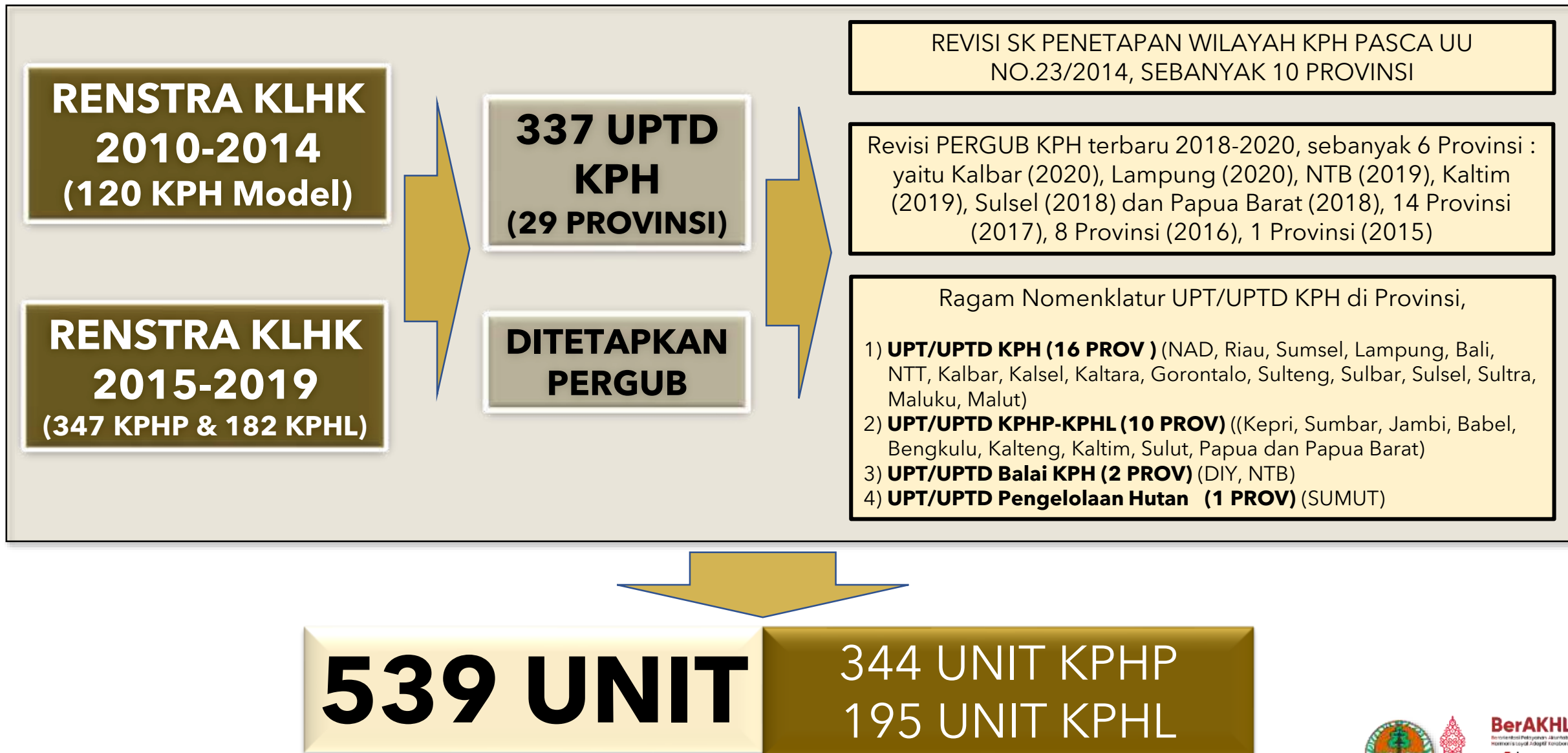
**Realisasi:**

Hingga tahun 2019, Ditjen PHPL telah mendorong 34 Unit Usaha untuk mengembangkan Hutan Tanaman Energi dengan pencapaian sebesar 156.032 Ha (156%)



**Peta Sebaran HTE**

# MODALITAS KELEMBAGAAN KPH DALAM RANGKA IMPLEMENTASI INDONESIA'S FOLU NET SINK 2030



# MODALITAS PBPH DALAM RANGKA IMPLEMENTASI INDONESIA'S FOLU NET SINK 2030

No.	PROVINSI	HA		HT		RE		TOTAL	
		Unit	Luas (± ha)	Unit	Luas (± ha)	Unit	Luas (± ha)	Unit	Luas (± ha)
1	Aceh	1	44,400.00	5	217,959.00			6	262,359.00
2	Bangka Belitung			8	214,085.29			8	214,085.29
3	Bengkulu	2	64,008.00			1	12,656.00	3	76,664.00
4	Gorontalo			2	74,147.78			2	74,147.78
5	Jambi	2	56,045.00	18	662,699.75	2	85,050.00	22	803,794.75
6	Kalimantan Barat	22	1,085,963.00	48	1,942,373.37	1	14,080.00	71	3,042,416.37
7	Kalimantan Selatan	3	177,266.00	17	529,977.00			20	707,243.00
8	Kalimantan Tengah	56	3,948,998.85	36	845,674.01	4	214,349.00	96	5,009,021.86
9	Kalimantan Timur	54	3,139,957.55	48	1,620,839.80	1	86,450.00	103	4,847,247.35
10	Kalimantan Utara	25	2,103,106.00	5	244,662.00			30	2,347,768.00
11	Lampung			3	108,909.00			3	108,909.00
12	Maluku	13	715,613.00	1	33,245.00			14	748,858.00
13	Maluku Utara	15	777,120.00	5	65,908.00			20	843,028.00
14	Nusa Tenggara Barat	1	28,644.00	3	33,850.00			4	62,494.00
15	Nusa Tenggara Timur			1	41,515.00			1	41,515.00
16	Papua	16	2,355,666.00	8	898,645.00			24	3,254,311.00
17	Papua Barat	20	2,779,090.00	1	87,224.95			21	2,866,314.95
18	Riau	2	133,589.00	46	1,525,944.05	5	149,807.00	53	1,809,340.05
19	Sulawesi Barat	1	30,525.00	1	10,600.00			2	41,125.00
20	Sulawesi Selatan			2	21,430.00			2	21,430.00
21	Sulawesi Tengah	7	368,066.00	2	73,320.00			9	441,386.00
22	Sulawesi Tenggara			3	54,280.00			3	54,280.00
23	Sumatera Barat	3	155,305.00	4	65,432.90			7	220,737.90
24	Sumatera Selatan			19	1,307,082.28	2	60,470.00	21	1,367,552.28
25	Sumatera Utara	5	246,003.00	8	349,517.52			13	595,520.52
<b>Total</b>		<b>248</b>	<b>18,209,365.40</b>	<b>294</b>	<b>11,029,321.70</b>	<b>16</b>	<b>622,862.00</b>	<b>558</b>	<b>29,861,549.10</b>



# SINERGITAS PARA PIHAK DALAM Mendukung IMPLEMENTASI INDONESIA'S FOLU NET SINK 2030 BIDANG PHL



HLN memegang peranan penting dalam mendukung terciptanya enabling condition untuk PHL



# FASE IMPLEMENTASI



# ARAHAN UMUM KEGIATAN TAHAP PRAKONDISI

## PENYIAPAN PRAKONDISI

### Kebijakan dan Regulasi

- Penyiapan seluruh manual/guidelines teknis pelaksanaan kegiatan;
- Penyempurnaan regulasi dan kebijakan;
- Penyiapan berbagai instrument kebijakan pendukung

### Teknologi

- Pembangunan system pemantauan, pelaporan, verifikasi aksi mitigasi FOLU Net SINK 2030 berbasis IT
- Mendorong berbagai kegiatan R&D

### SDM

- Penyiapan pendampingan teknis bagi SDM pelaksana kegiatan;
- Pelibatan aktif akademisi dalam rangka peningkatan kualitas SDM

### Kemitraan

- Penyiapan program dan strategi komunikasi public
- Pengembangan forum komunikasi
- Pengembangan kemitraan para pihak
- Koordinasi dan kolaborasi antar sector terkait

### Anggaran

- Pendetilan rencana kerja dan rencana anggaran implementasi kegiatan
- Penyiapan kelembagaan pendanaan FOLU NetSink 2030



# ARAHAN UMUM KEGIATAN TAHAP AKTUALISASI

## AKTUALISASI KEGIATAN

### Kebijakan dan Regulasi

- Implementasi seluruh manual/guidelines teknis pelaksanaan kegiatan;
- Pengarusutamaan hasil penyempurnaan regulasi dan kebijakan

### Teknologi

- Pemanfaatan system pemantauan, pelaporan, verifikasi aksi mitigasi FOLU Net SINK 2030 berbasis IT
- Penguatan berbagai kegiatan R&D

### SDM

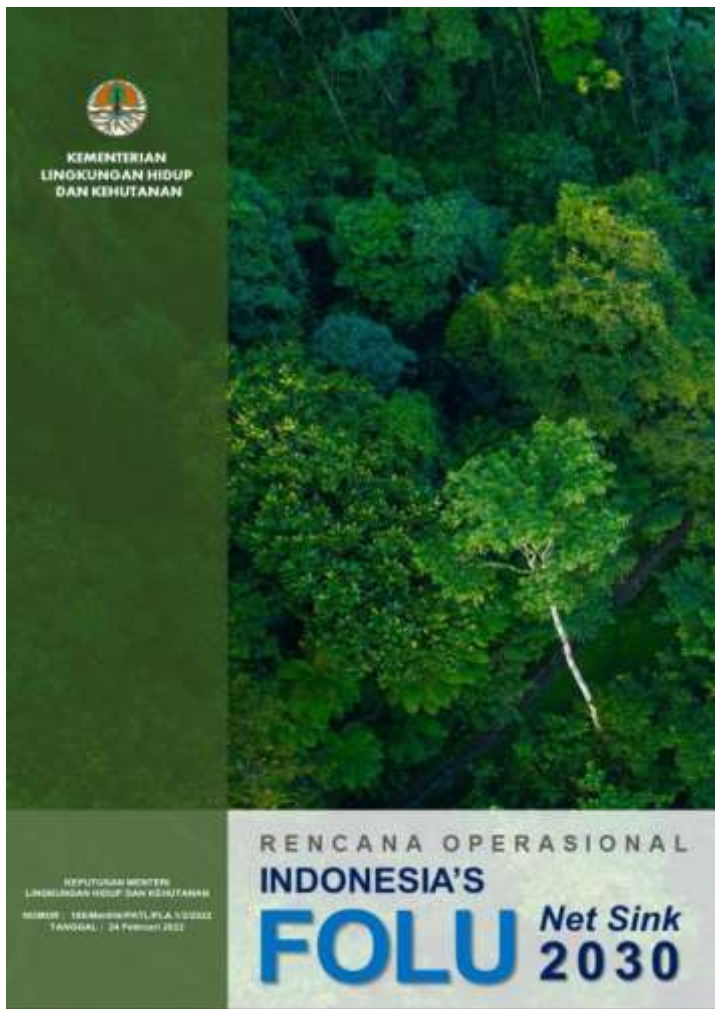
- pendampingan teknis bagi SDM pelaksana kegiatan;
- peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM

### Kemitraan

- Implementasi program dan strategi komunikasi publik
- Penguatan forum komunikasi
- Penguatan kemitraan para pihak
- Penguatan Koordinasi dan kolaborasi antar sektor terkait

### Anggaran

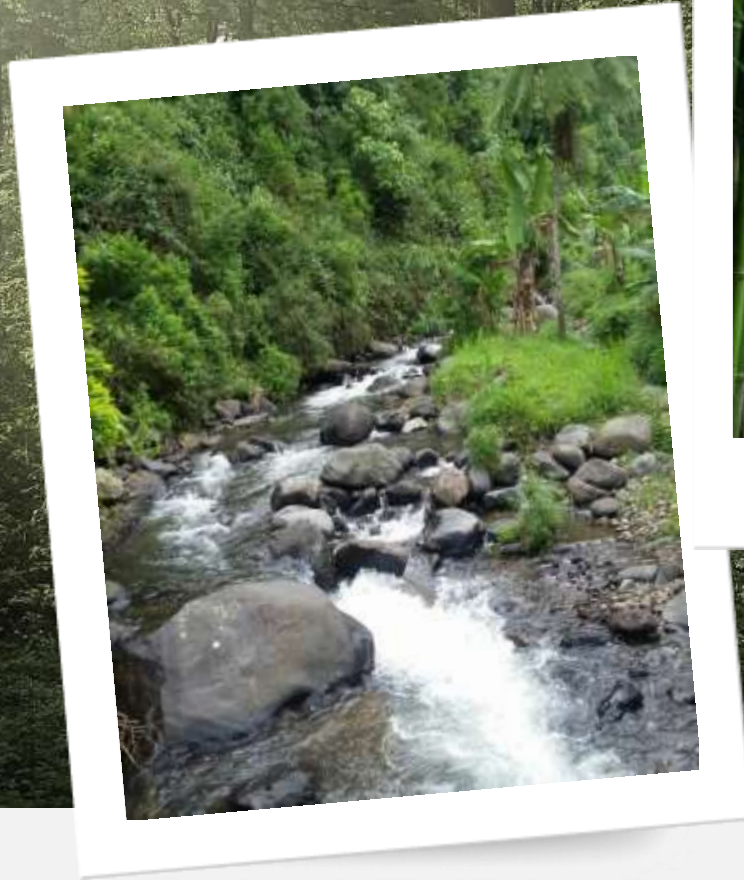
- Implementasi rencana kerja dan rencana anggaran implementasi kegiatan
- Implementasi kelembagaan pendanaan FOLU NetSink 2030



- Rencana Kegiatan yang dituangkan dalam Renops Indonesia's FOLU Net Sink 2030 merupakan kegiatan BAU Sektor Kehutanan, namun akan dilaksanakan lebih **TERSTRUKTUR** dan **SISTEMATIS**.
- Indonesia's FOLU Net Sink 2030 mendorong kinerja sektor kehutanan menuju target pembangunan yang sama, yaitu tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar **-140 juta ton CO<sub>2</sub>e pada tahun 2030**.
- Pijakan dasar utamanya adalah: Sustainable Forest Management, Environmental Governance, dan Carbon Governance.



<https://phl.menlhk.go.id>



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Peta jalan, Akuntabel, Kompeten,  
Mamoru, loyal, Adaptif, Koraboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

# Terima Kasih